

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. LKPJ itu sendiri terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

LKPJ Dinas perkebunan Provinsi Jambi tahun 2018 merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perkebunan sebagai bagian dari OPD Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LKPJ Gubernur pada akhir Tahun Anggaran 2018, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor Perkebunan Provinsi Jambi pada TA. 2018, baik yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi maupun APBN Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2018, didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;

B. Gambaran Umum

1. Perkembangan Pembangunan Perkebunan

Pada tahun Tahun 2017 **Luas areal perkebunan** tercatat seluas 1.936.145 Ha, bila dibandingkan dengan tahun 2016, dengan luas areal 1.580.733 Ha, maka terjadi **peningkatan sebesar 6,44 %**. Distribusi luasan komoditas perkebunan tahun 2017 masih didominasi oleh 7 (tujuh) komoditi unggulan yaitu karet 673.350 Ha, kelapa sawit 1.039.920 Ha, kelapa 118.695 Ha, cassiavera 45.924 Ha, kopi 27.166 Ha, pinang 20.985 Ha, kakao 2.432 Ha, dan komoditi lainnya 7.673 Ha.

Sementara itu produksi selama tahun 2017 secara umum juga mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan produksi selama Tahun 2016. **Total produksi komoditas perkebunan** pada Tahun 2017 mencapai 2.234.349 ton dan pada Tahun 2016 sebesar 2.158.024 ton yang berarti mengalami **kenaikan sebesar 3,0 %**. Kenaikan Produksi tersebut diakibatkan oleh ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan produksi seperti Karet Kelapa Sawit, Kelapa dalam, Kopi, Casiavera dan Pinang , hal ini terjadi karena ada penambahan luas area tanam seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa memberikan kontribusi langsung terhadap pertambahan jumlah produksi.

Adapun capaian produksi komoditi perkebunan tahun 2017 meliputi karet 341.313 ton, kelapa sawit 1.683.532 ton, dan kopi 14.323 ton, cassiavera 56.681 ton, pinang 13.395 ton, kakao 802 ton nilam 295 ton, tembakau 317 ton dan tebu 9.655 ton.

2. Perekonomian

Sub sektor Perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar pada laju perkembangan ekonomi di Provinsi Jambi. Beberapa produk dan hasil olahan komoditas perkebunan diekspor dengan negara tujuan Malaysia, Singapura, USA, Jepang dan lain-lain. Nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang, baik volume maupun nilai ekspor bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dihasilkan dari ekspor komoditi karet, kelapa sawit (CPO), kelapa (kelapa butir, kopra dan minyak kelapa mentah), kopi, pinang dan lain-lain.

Volume ekspor komoditi perkebunan pada tahun 2017 tercatat sebesar 928.067.254 ton dengan nilai ekspor mencapai US \$ 1.438.504.243,70,-, bila dibandingkan dengan tahun 2016 volume ekspor mencapai 748.886,518 ton dengan nilai ekspor US \$ 1.162.543.054,97,-, maka mengalami kenaikan sebesar 24,0 %.

Nilai ekspor ini berdampak positif terhadap penerimaan devisa, selain itu juga tentunya berperan dalam meningkatkan pendapatan petani pekebun. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perkebunan cenderung meningkat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada 5 tahun terakhir disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1 PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan di Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Keadaan Tahun 2011 – 2017 (dalam jutaan rupiah). Tahun dasar 2010.

NO	LAPANGA USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	33,312,291.6	37,967,924.2	43,793,238.6	51,148,503.1	56,199,421.2
2	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	29,314,865.2	33,117,948.8	38,141,366.1	44,921,108.7	49,628,510.1
3	Tanaman Pangan	3,315,429.7	3,602,657.3	3,911,979.4	4,297,568.1	4,383,060.3
4	Tanaman Holtikultura	4,091,586.5	4,849,229.1	5,405,993.9	6,343,663.3	6,647,145.3
5	Tanaman Perkebunan	19,927,344.4	22,482,722.9	26,339,116.0	31,527,871	35,679,166.3
6	Peternakan	1,605,077.6	1,814,917.1	2,089,384.1	2,279,693.2	2,408,276.8
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	375,427.0	369,177.8	394,892.8	472,313.2	510,861.5
8	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,555,367.1	1,834,917.1	2,119,458.8	2,266,483.6	2,295,899.8
9	Perikanan	2,442,059.2	3,015,058.2	3,532,413.6	3,960,910.8	4,275,011.4
10	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	129,976,040.5	144,814,418.3	155,065,656.0	171,654,184.1	191,098,712
11	PDRB SEKTOR PERKEBUNAN	19,927,344.4	22,482,722.9	26,339,116.0	31,527,871.0	35,679,166.3
12	KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PDRB PROVINSI JAMBI	15.3	15.5	17.0	18.4	18.7
13	KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PDRB PERTANIAN	59.82	59.22	60.14	61.64	63.49

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (BPS)

Dari tabel diatas terlihat bahwa kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian dan Kehutanan maupun Provinsi Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013-2017) cenderung meningkat. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian tahun 2017 sebesar Rp.

56.199.421,2,- bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 51.148.503.1,- atau meningkat 9,01 %. Dimana PDRB sektor perkebunan terhadap PDRB sektor Pertanian tahun 2017 sebesar Rp.35.679.166.3,- bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 31.527.871,- maka meningkat sebesar 12,36 %, selanjutnya sektor Perkebunan memberikan kontribusi terhadap PDRB sector Pertanian pada tahun 2017 mencapai 63,49 % dan bila dibandingkan tahun 2016 tercatat 61,64 % maka meningkat sebesar 2,0 %. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan sub sektor perkebunan dalam menggerakkan perekonomian di Propinsi Jambi.

3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembangunan

a. Kelembagaan Dinas Perkebunan

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok, yakni ; **membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perkebunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Sedangkan fungsinya sebagai ;

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
3. Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan suvervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan.

5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD yang terkait.
7. Penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dan,
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 bagian Sekretariat dan 4 bidang teknis serta 2 UPTD, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

b. Kepegawaian Dinas Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan, masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPTD mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Secara umum, susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

No	Tingkat Jabata	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	7	Sekretaris, Kepala Bidang , dan Kepala UPTD
3	Eselon IV	21	Kasubbag dan Kasi
4	Fungsional	17	PPS dan PMHP
5	Staf	74	Sarjana dan non Sarjana
6	TKS dan PLTKP	43	Sarjana dan non Sarjana

*)Sumber data : data olahan dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2018

Berdasarkan status dan golongannya, kondisi pegawai Dinas Perkebunan Propinsi Jambi dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Kepangkatan Keadaan s/d Akhir Tahun 2018.

NO.	STATUS APARATUR	GOLONGAN KEPANGKATAN					JUMLAH
		IV	III	II	I	Hnr	
1.	PNS	21	74	24	1	0	120
2.	CPNS	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	21	74	24	1	0	120

*)Sumber data : data olahan dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menduduki golongan III (61,6 %), diikuti dengan golongan II (20,0 %), golongan IV (17,0 %) , dan golongan I (1,0 %).

Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi aparatur Dinas Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4. Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan s/d Akhir Tahun 2018.

NO.	STATUS APARATUR	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D.3	SLTA	SLTP	SD	
1.	PNS	9	73	1	36	0	1	120
2.	CPNS	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	9	73	1	36		1	120

*)Sumber data : data olahan dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2018

Dari table tersebut terlihat bahwa mayoritas aparatur Dinas Perkebunan Propinsi Jambi memiliki tingkat pendidikan S2 (7,50 %), S1 (60,83 %), diikuti dengan SLTA (30,0 %), D3 (0,8 %) , SLTP (0 %), dan SD (0,8 %).

Untuk meningkatkan kualitas/kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam bidang teknis maupun manajerial telah dilaksanakan pendidikan maupun pelatihan formal dan non formal.

Jumlah Pegawai yang tercatat mencapai 163 orang, dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dilengkapi dengan sarana kerja yang cukup lengkap akan tetapi saat ini kondisi sarana kerja tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak ringan hingga berat. Untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin besar dimasa yang akan datang diperlukan penambahan sarana kerja yang lebih memadai.

Sarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi saat ini dapat terlihat pada tabel 1.5. berikut.

Tabel 1.5. Kelengkapan Sarana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

No	Jenis Sarana Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1.343.318 M ²	-Sebagian besar blm bersertifikat
2	Bangunan	682 unit	- 249 unit rusak berat -190 unit rusak ringan -10 unit dipakai Pemkab.
3	Alat Berat	31 unit	- 25 unit rusak berat -6 unit rusak ringan
4	Alat Angkut	449 unit	-249 unit, baik -129 unit rusak berat -71 unit rusak ringan
5	Alat Pertanian	2.826 unit	-2820 unit rusak berat -4 unit rusak ringan -2 unit , baik
6	Alat Pengolah Data	54 unit	-33 unit rusak berat -13 unit rusak ringan -8 unit baik
7	Alat Laboratorium	8.335 unit	-7385 unit baik -27 unit rusak ringan -903 unit rusak berat
8	Alat Rumah Tangga dan Kantor	6.150 unit	320 unit baik 244 unit rusak ringan 5475 unit rusak berat
9	Alat Bengkel dan Ukur	98 unit	-97 unit rusak berat -1 unit rusak ringan

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Visi dan Misi

Tahun 2018 merupakan tahun Ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Dalam RPJM ini tercantum Visi dan Misi Provinsi Jambi yang harus dicapai yaitu **"TERTIB UNGGUL NYAMAN TANGGUH ADIL SEJAHTERA"**. **Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, yaitu :**

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif, serta berorientasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan bersetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal.

Misi peningkatan daya saing daerah merupakan misi yang diemban oleh Sektor Pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor Perkebunan. Perwujudan dari misi ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang didukung melalui kebijakan pembangunan daerah dalam menyelesaikan beberapa isu pokok pembangunan. Kebijakan pembangunan daerah di tuangkan dalam **Agenda Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021** yaitu :

1. Meningkatkan produksi dan Produktivitas tanaman karet, sawit, kopi dan pinang.

- 1.1. Menyediakan benih unggul tanaman karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa untuk pengembangan yang bersifat bantuan dan subsidi.
- 1.2. Menyediakan pupuk dan pestisida untuk komoditi karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa.
- 1.3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa serta petugas.
2. Meningkatkan Penggunaan benih unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana Input.
3. Meningkatkan Kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.
4. Meningkatkan Kualitas SDM aparat dan masyarakat perkebunan melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan sistim kebersamaan Ekonomi.

Mencermati pembaraharuan arah pembangunan sub sektor perkebunan yang ditetapkan sebagai pemantapan arah pembangunan yang ditempuh pada periode sebelumnya, Maka **Visi** Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

Terwujudnya Perkebunan Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Jambi TUNTAS 2021.

Upaya mewujudkan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi merupakan tantangan bagi aparat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sebagai upaya nyata guna mencapai Visi tersebut maka ditetapkan **Misi** yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dan berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang administrasi dan manajemen kelembagaan

Misi tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan bagi peningkatan peran petani dalam aktifitas sub sektor perkebunan. Dengan adanya reorientasi pendekatan pembangunan perkebunan ini, diharapkan peran petani semakin meningkat sehingga nilai tambah dalam sub sistim agribisnis lainnya juga dapat dinikmati petani perkebunan.

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) petani perkebunan yang selama ini selalu menjadi kendala dalam memajukan peran petani dalam pembangunan perkebunan akan terus ditingkatkan melalui berbagai upaya pelatihan, magang, studi banding dan lain-lain. Dengan meningkatnya kualitas SDM petani perkebunan diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan usahanya baik on farm maupun off farm yang berorientasi agribisnis.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta arah kebijakan pembangunan yang mengacu pada program dan kegiatan pusat dan daerah..

Sasaran strategis kementerian Pertanian tahun 2015-2019 meliputi 6 Sasaran pokok ;

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku *bio-energy dan bio-industry*.
5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
6. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Adapun Strategi pembangunan Perkebunan secara Nasional adalah :

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
2. Pengembangan Komoditas
3. Peningkatan Dukungan terhadap System Ketahanan Pangan
4. Investasi Usaha Perkebunan
5. Pengembangan System Informasi Manajemen Perkebunan
6. Pengembangan SDM
7. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
8. Pengembangan Dukungan terhadap Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menyusun **strategi** yang selaras dengan Strategi umum dan nasional dimaksud, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani karet, kelapa sawit, kopi dan pinang.
2. Menyediakan benih unggul tanaman karet, kelapa sawit, kopi dan pinang.
3. Menyediakan pupuk dan pestisida untuk komoditi karet, kelapa sawit, kopi dan pinang.
4. Mendata potensi produksi benih unggul.
5. Melakukan pembinaan mutu benih dan pengawasan peredaran benih unggul.
6. Melakukan pengujian dan penilaian serta sertifikasi benih unggul.
7. Menciptakan kelompok-kelompok tani pengendali agens hayati berbasis kearifan lokal.
8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengendalian OPT perkebunan.
9. Mengidentifikasi gejala serangan penyakit JAP pada tanaman karet.

10. Meningkatkan volume APH untuk tanaman perkebunan dan volume luas desa organik berbasis perkebunan.
11. Mengembangkan fungsi brigade proteksi dan pemberdayaan petugas OPT perkebunan.
12. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pekebun.
13. Memfasilitasi pengadaan sarana dan pengolahan komoditi unggulan perkebunan.
14. Melakukan Bimbingan teknis penerapan jaminan mutu komoditi unggulan perkebunan.
15. Memfasilitasi penggunaan bahan pengolahan ramah lingkungan bagi UPPB.
16. Melakukan pengumpulan informasi data harga komoditi unggulan perkebunan serta memfasilitasi penetapan harga TBS kelapa sawit.
17. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya penyelesaian GUKP.
18. Peningkatan pemantauan perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian GUKP.
19. Melaksanakan pembangunan Demplot/percontohan pembukaan lahan tanpa bakar.
20. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha perkebunan tentang pembukaan lahan tanpa bakar.
21. Melaksanakan Koordinasi terpadu dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
22. Melaksanakan pemantauan dan ground check kejadian kebakaran lahan dan kebun sesuai dengan data hotspot.
23. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan pameran untuk pengembangan peluang pasar.
24. Menginformasikan potensi dan investasi komoditi unggulan perkebunan.
25. Mensosialisasikan regulasi tentang pembinaan usaha perkebunan.
26. Melakukan pendataan, evaluasi dan penilaian terhadap usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

27. Melaksanakan Bimbingan teknis bagi pelaku usaha perkebunan dan pelatihan bagi pembina usaha perkebunan.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan Provinsi Jambi, maka arah kebijakan pembangunan perkebunan untuk lima tahun kedepan, adalah :

1. Pemberdayaan penangkar benih/bibit perkebunan.
2. Peningkatan pembinaan, pengawasan terhadap peredaran dan penyimpanan pupuk dan pestisida.
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi penerapan teknologi pembangunan perkebunan.
4. Melaksanakan pengembangan karet rakyat, kopi rakyat, dan peremajaan kelapa sawit.
5. Menyediakan benih unggul bersertifikat melalui pembibitan tanaman perkebunan.
6. Mengeksplorasi benih unggul/lokal melalui kerjasama dengan Pusat/Balai Penelitian.
7. Menciptakan SDM Perbenihan yang profesional.
8. Meningkatkan tata kelola sumber input dan APH untuk OPT Perkebunan.
9. Peningkatan penyelenggaraan perbanyakan isolat Agens Pengendalian Hayati.
10. Meningkatkan kemampuan petani dalam pengendalian OPT JAP pada tanaman karet.
11. Peningkatan penyelenggaraan uji mutu efektifitas APH.
12. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengendalian OPT perkebunan.
13. Melaksanakan Bimtek/Diklat Teknis Perkebunan.
14. Melaksanakan pemberdayaan pekebun melalui SKE.
15. Menumbuh kembangkan Unit Pengolahan Kopi, Tebu dan Bokar.
16. Menumbuh kembangkan industri pengolahan Kopi, Tebu, Bokar skala kecil.

17. Meningkatkan mutu Bokar sesuai dengan SNI.
18. Menurunnya persentase kerusakan fungsi lingkungan akibat pencemaran limbah.
19. Tertibnya perusahaan mitra dalam menetapkan pembelian TBS kelapa sawit sesuai dengan mutu dan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
20. Menjalin kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan pekebun.
21. Menyediakan data harga komoditi unggulan perkebunan yang akurat.
22. Meningkatkan upaya pemantauan dan fasilitasi penyelesaian kasus GUKP.
23. Membentuk kelompok tani peduli api (KTPA), Brigade/Regu pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
24. Mewajibkan bagi seluruh perusahaan perkebunan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
25. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pemasaran bagi produk komoditi perkebunan.
26. Meningkatkan pelayanan informasi potensi investasi dan bisnis sektor perkebunan.
27. Meningkatkan SDM pembina usaha perkebunan yang profesional.
28. Meningkatkan SDM pelaku usaha perkebunan.
29. Meningkatkan kualitas pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.3. Prioritas Daerah

Kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan sub sektor perkebunan Tahun 2013-2018 tersebut dalam tahun 2018 memiliki prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang didanai APBD:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- Pengadaan komputer

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal

e. Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD/OPD.

- Penyusunan Laporan keuangan dan asset

f. Program Peningkatan Nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk perkebunan.

- Pengawasan Tata Niaga TBS dan Bokar
- Promosi dan pengembangan peluang pasar
- Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)
- Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan

g. Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Perkebunan.

- Pengembangan sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan
- Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
- Pembinaan, pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH
- Bimbingan teknologi perbanyakan dan aplikasi agen hayati
- Pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam, dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTB
- Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida
- Pengembangan kopi rakyat
- Pengembangan Mutu Benih Perkebunan
- Pengembangan dan Disversifikasi usaha tani tembakau
- Updating data base komoditi unggulan
- Pengembangan kopi dan coklat diareal kelapa dalam
- Pembibitan Tanaman Perkebunan
- Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO
- Pengembangan Asosiasi petani perkebunan
- Pengawasan peredaran dan mutu benih
- Pemberdayaan pelaku perbenihan tanaman perkebunan
- Pengembangan/ peningkatan jalan usaha tani

- Peremajaan/ replanting kelapa sawit
- Peremajaan Tanaman Kelapa
- Pengembangan tanaman lada untuk peningkatan pendapatan petani karet
- Fasilitasi kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha perkebunan
- Intensifikasi karet rakyat
- Pemeliharaan kebun entres
- Pembangunan kebun induk pinang
- Sosialisasi penerapan teknologi perkebunan
- Penyusunan Program Perkebunan
- Penyusunan Statistik Perkebunan
- Pertemuan Koordinasi kebakaran lahan dan kebun

2. Program dan Kegiatan yang didanai APBN:

1) Tugas Pembantuan

a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- Kegiatan Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar
- Kegiatan Pengembangan tanaman semusim dan rempah
- Kegiatan Dukungan perlindungan perkebunan
- Kegiatan Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- Kegiatan Dukungan perbenihan tanaman perkebunan
- Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

2) Dekonsentrasi

a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- Kegiatan Dukungan perlindungan perkebunan
- Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

3. Fokus Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 ;

- a. Pengembangan Komoditi Ekspor Unggulan Nasional di luar Revitalisasi Perkebunan, dalam rangka mempertahankan pasar yang sudah ada seperti Kopi dan pinang.
- b. Lanjutan Akselerasi Peningkatan Produktivitas komoditi ekspor seperti : karet, kelapa sawit, kelapa.
- c. Pengembangan Komoditas unggulan Spesifik lokal yang sudah dikenal di pasar internasional, dikembangkan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada, seperti cassiavera.
- d. Revitalisasi Perbenihan, ditempuh melalui pembangunan, penetapan, pemeliharaan, dan pemurnian kebun entres, kebun induk, pohon terpilih, penguatan kelembagaan perbenihan, laboratorium dan sarannya serta pengawasan terhadap mutu dan peredarannya.
- e. Revitalisasi Perlindungan Perkebunan, ditempuh melalui penguatan kelembagaan perlindungan perkebunan, laboratorium dan sarannya termasuk SDM-nya; membangun sistem peringatan dini untuk pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan lahan, anomali iklim dan gangguan usaha perkebunan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jambi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha, adalah berupa:

- Retribusi Penjualan Produk Usaha Kebun Dinas, yang dikelola oleh Balai Pengembangan dan Pengawasan Mutu Benih Perkebunan, yaitu berupa hasil penjualan produk perkebunan di Jambi (berupa produk: Karet, Kopi dan kelapa sawit);
- Retribusi Sertifikasi Bibit Tanaman Perkebunan, yang dikelola oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, yaitu berupa jasa Sertifikasi Bibit Tanaman Perkebunan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2018 sebesar Rp.1.665.000.000,00,-, yang diperoleh melalui Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa produk Komoditi Karet, Kopi bubuk dan bibit kelapa Sawit, dengan rincian sebagai berikut :

1. Karet : Rp. 50.000.000,00,-
2. Kopi bubuk : Rp. 15.000.000,00,-
3. Bibit K.Sawit : Rp.1.600.000.000,00,-

Sampai dengan akhir TA. 2018, dicapai pendapatan dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.662.113.800,00,- (99,83 %) dengan rincian sebagai berikut ;

1. Karet : Rp. 49.309.800,00,-
2. Kopi bubuk : Rp. 55.420.700,00,-
3. Bibit K.Sawit : Rp.1.557.383.300,00,-

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan umum keuangan daerah tentang belanja daerah antara lain untuk memfasilitasi setiap program/kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan mekanisme perencanaan yang terstruktur sebagaimana yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA OPD dan Renja OPD.

Didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut sudah mencakup kebijakan belanja untuk memfasilitasi: Janji Gubernur, Program Prioritas dan Unggulan Daerah dan Tematik Kewilayahan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan sub sektor perkebunan tahun 2018, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk mendukung:

- Pengembangan Fokus Komoditas yang sudah diklasifikasikan menjadi: Komoditas Strategis, Komoditas Prospektif dan Komoditas Unggulan Spesifik Lokal;
- Pengembangan Fokus Budidaya, mencakup: Peningkatan produksi dan produktivitas melalui: intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, penggunaan benih unggul dan diversifikasi; Peningkatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Tanaman Perkebunan yang Efektif, Efisien dan Ramah Lingkungan; serta Pengendalian pemanfaatan sumber daya perkebunan (Lahan & Plasma Nutfah) yang berkesinambungan.
- Pengembangan Fokus Perbenihan, mencakup: Pengembangan UPTD Perbenihan Di Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota; Peningkatan Koordinasi Peran Dan Fungsi Penangkar-penangkar Benih Berkualitas; Pengembangan Teknologi Perbenihan Yang Modern Dan Berdaya Saing; Peningkatan Pengawasan Mutu Dan Peredaran Benih; serta Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Benih
- Pengembangan Fokus Sarana & Prasarana, mencakup: Fasilitasi Pendukung Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana-prasarana Budidaya Tanaman Perkebunan; serta Mendorong Tumbuhnya Peran Dunia Usaha

Dalam Mendukung Penyediaan Sarana Prasarana Perkebunan

- Pengembangan Fokus Pengendalian GUP, mencakup: Pengembangan Pestisida & Agens Hayati Alami; Pengembangan Teknologi PHT Yang Efektif, Efisien Dan Berwawasan Lingkungan; serta Mendorong Tumbuhnya Kelompok atau Petandu PHT Yang Profesional dan Mandiri.
- Pengembangan Fokus SDM, Kelembagaan dan Permodalan, mencakup: Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan Rakyat, Baik Pada Aspek Pembenihan, Teknis Budidaya, Pengendalian Hama Penyakit, Maupun Pengolahan Produk; Peningkatan Pemantapan Kelembagaan Pelaku Usaha Yang Profesional dan Mandiri; serta Peningkatan Akses Permodalan Yang Memiliki Keberpihakan Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan Rakyat
- Pengembangan Fokus Pasca Panen & Pemasaran, mencakup: Perlu Upaya Terobosan Dalam Pengembangan Mutu Produk Yang Berdaya Saing Dan Bernilai Tambah, dengan prioritas keberpihakan pada produk usaha Perkebunan Rakyat; serta peningkatan akses pasar yang lebih luas, yang manfaatnya dirasakan oleh pelaku usaha perkebunan di tingkat On Farm.

2. Target dan Realisasi Belanja

APBD Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 35.271.850.911,-** (*Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*), yaitu terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 13.672.767.214,-** (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 21.599.083.697,-** (*Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 13.672.767.214,-** (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*), merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan (Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, dan Tambahan Penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan, serta Insentif Pemungutan Retribusi).

Realisasi dari Belanja Tidak Langsung tersebut adalah sebesar **Rp. 12.334.796.705,-** (*Terbilang : dua belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah*) atau sekitar 90,21 %.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar **Rp. 21.599.083.697,-** (*Terbilang : Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal.

Realisasi dari Belanja Langsung tersebut adalah sebesar **Rp. 16.315.788.449,-** (*Terbilang : Enam Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 75,54%. Terdiri dari: Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

Adapun rincian target dan realisasi belanja daerah berdasarkan program/kegiatan, adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik APBD
Tahun 2018

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL APBD 2018	35.271.850.911	28.650.585.154	81,23	82,64
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji + Tunj)	13.672.767.214	12.334.796.705	90,21	100,00
	TOTAL ANGGARAN (WAJIB + PILIHAN)	21.599.083.697	16.315.788.449	75,54	76,74
1.	TOTAL URUSAN WAJIB	2.505.032.360	2.324.091.016	92,78	97,36
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.374.018.600	1.310.063.952	95,35	99,71
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.130.000	23.130.000	100	100
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	333.000.000	277.070.872	83,20	100
3	Penyediaan Administrasi Keuangan	312.033.600	308.102.800	98,74	98,74
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.900.000	61.900.000	100	100
5	Penyediaan Alat tulis kantor	95.555.000	93.931.000	98,30	100
6	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.580.000	34.580.000	100	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	21.120.000	21.120.000	100	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	43.000.000	43.000.000	100	100
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	447.700.000	447.229.280	99,45	100
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.445.244.000	1.330.968.304	92,09	97,34
1	Pembangunan gedung kantor	699.800.000	627.426.000	89,66	100
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	167.000.000	136.700.000	81,86	82,04
3	Pengadaan mebeleur	76.324.000	75.350.000	98,72	100
4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	373.600.000	365.097.304	97,72	97,72
5	Pengadaan komputer	68.820.000	66.695.000	96,91	100

6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	59.700.000	59.700.000	100	100
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94.200.000	93.258.000	99,00	100
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	94.200.000	93.258.000	99,00	100
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	51.450.000	49.611.000	96,43	100
1	Pendidikan dan pelatihan formal	51.450.000	49.611.000	96,43	100
1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	129.299.760	129.299.760	100	100
1	Penyusunan laporan keuangan dan aset	129.299.760	129.299.760	100	100
2.	Total Urusan Pilihan	19.094.051.337	13.991.697.433	73,28	75,03
2.1.	Program Peningkatan produksi dan teknologi budidaya Perkebunan	15.450.680.337	10.504.944.174	67,99	72,67
1	Pengembangan Kopi Rakyat	1.761.827.000	163.322.673	9,27	9,27
2	Pembibitan Tanaman Perkebunan	2.803.468.000	2.590.079.617	92,39	98,24
3	Pengembangan/peremajaan / replanting kelapa sawit	1.274.665.000	45.832.032	3,60	3,60
4	Intensifikasi karet rakyat	1.085.981.000	121.462.720	11,18	11,18
5	Pemeliharaan kebun entres	210.674.700	201.212.562	95,51	96,16
6	Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan perkebunan	84.710.00	80.637.500	95,19	95,19
7	Pemberdayaan pelaku perbenihan tanaman perkebunan	109.425.000	109.425.000	99,98	100
9	Pengembangan dan Diversifikasi usaha tani tembakau	999.203.000	907.050.500	90,78	90,79
10	Updating data base pemetaan komoditi unggulan perkebunan	409.087.000	250.587.000	61,26	61,26
11	Pengembangan kopi coklat diareal kelapa dalam	932.171.000	777.444.000	83,40	87,35
12	Pembinaan perusahaan perkebunan besar dan ISPO	334.350.000	334.350.000	100	100
13	Pengembangan Asosiasi petani perkebunan	68.984.000	68.768.000	99,69	100
14	Peremajaan tanaman kelapa	218.900.000	209.064.200	95,51	98,67
15	Pengembangan tanaman lada untuk peningkatan pendapatan petani karet	256.268.000	254.678.000	99,38	100

16	Fasilitasi kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha komoditi perkebunan	423.357.000	386.085.000	91,20	91,20
17	Pengembangan Sarana Irigasi/ TAM dan Optimalisasi Lahan Perkebunan	742.218.000	466.113.801	62,80	47,55
18	Fasilitasi Penyelesaian gangguan usaha perkebunan (GUP)	136.238.000	132.642.950	97,36	97,36
19	Pembinaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran dan bencana alam, Dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTB	198.563.000	185.834.451	93,59	93,67
20	Pengembangan/ Peningkatan jalan usaha tani	378.559.637	307.647.700	81,27	81,78
21	Peningkatan Pembinaan Pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida	82.000.000	79.194.000	96,58	96,58
22	Pertemuan koordinasi lahan dan kebun	179.969.000	161.303.300	89,63	89,66
23	Pengawasan Peredaran dan Mutu Benih Perkebunan	247.000.000	241.650.000	97,83	97,97
24	Pengembangan Mutu Benih Perkebunan	320.507.000	296.464.279	92,50	92,50
25	Pembinaan, pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH	705.988.000	671.617.889	95,13	96,23
26	Bimbingan Teknologi perbanyakan dan Aplikasi hayati bagi petani provinsi	308.257.000	284.257.000	92,21	92,21
27	Penyusunan Program Perkebunan	339.176.000	339.176.000	100	100
28	Penyusunan Statistik Perkebunan	249.934.000	249.934.000	100	100
2.2	Program Peningkatan Nilai tambah, daya saing dan Pemasaran Produk perkebunan	3.643.371.000	3.486.753.259	95,70	96,05
1	Pengawasan tata niaga TBS dan Bokar	398.445.000	363.291.375	91,18	91,22
2	Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar	361.229.000	358.430.975	99,23	99,45
3	Peningkatan Pengolahan dan mutu hasil perkebunan (Model UPPB)	285.732.000	251.520.580	88,03	88,21
4	Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	2.597.965.000	2.513.510.329	96,75	97,18

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jambi Tahun 2018 juga ditunjang dengan dana APBN, yaitu berupa Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

APBN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tugas Pembantuan
(APBN) Tahun 2018

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN		Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi
			(Rp)	(%)	(Fisik)
1		2	3	4	5
TOTAL		23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75
Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Perkebunan		23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75
Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75
1	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15,907,580,000	13,945,754,138	87.67	98.45
2	Dukungan Perlindungan Perkebunan	2,020,775,000	1,803,308,700	89.24	100.00
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1,130,600,000	1,130,529,300	99.99	100.00
4	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	776,736,000	427,601,250	55.05	61.45
5	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2,245,435,000	2,156,590,811	96.04	100.00
6	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1,513,208,000	972,819,554	64.29	71.00

APBN DEKONSENTRASI (DK)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Dekonsentrasi (APBN) Tahun 2018

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN		Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi
			(Rp)	(%)	(Fisik)
1		2	3	4	5
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		2.137.800.000	2.018.275.658	94,41	100
1	Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)	1.216.000.000	1.114.442.800	91,65	100
2	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK)	921.800.000	903.832.858	98,05	100

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2018 merupakan tahun ke ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Periode 2016 - 2021. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan didalam RPJMD adalah “ **Jambi TUNTAS 2021** “ yaitu “**Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera**”.

Mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk periode tahun 2016-2021 adalah mendukung *terwujudnya pencapaian Misi 1, Misi 4 dan Misi 5* yang telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dalam rangka mensukseskan pencapaian Jambi TUNTAS 2021.

Berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : “ ***Terwujudnya Perkebunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Jambi Tuntas 2021*** ”

Upaya mewujudkan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, maka ditetapkan Misi yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang administrasi dan manajemen kelembagaan.

Pada tahun 2018, upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan misi pembangunan perkebunan tersebut adalah melaksanakan kegiatan melalui 2 (dua) program utama pembangunan perkebunan yaitu : **Program peningkatan produksi dan teknologi budidaya perkebunan, dan Program peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk perkebunan.**

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Perkebunan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari visi-misi tersebut, didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2018, baik APBD Murni maupun APBD Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
REKAPITULASI APBD DINAS PERKEBUNAN TA. 2018

No	RINCIAN	APBD TAHUN 2018		REALISASI		
		APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	KEUANGAN		FISIK
	TOTAL	34.869.221.175	35.271.850.911	28.650.585.154	81,23	82,64
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji)	12.184.528.238	13.672.767.214	12.334.796.705	90,21	100,00
2	Belanja Langsung	22.684.692.937	21.599.083.697	16.315.788.449	75,54	76,74
	a. Urusan Wajib	3.004.512.600	2.505.032.360	2.324.091.016	92,78	97,36
	b. Urusan Pilihan	19.680.180.337	19.094.051.337	13.991.697.433	73,28	75,03

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan selama TA. 2018 ini dilakukan melalui pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan, berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan selama TA. 2018 berdasarkan Urusan Wajib, terdiri dari 5 Program dan 18 Kegiatan, sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

- 8) Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pembangunan Gedung Kantor
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3) Pengadaan Mebeleur
 - 4) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
 - 5) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
 - 6) Pengadaan komputer
- c. Program Penigkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Kegiatan Laporan keuangan dan Aset

2) Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

➤ Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan selama TA. 2018 berdasarkan Urusan Pilihan, terdiri dari 2 Program dan 18 Kegiatan, sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan, terdiri dari kegiatan:
 - 1. Pengawasan Tata Niaga TBS dan Bokar
 - 2. Promosi dan pengebangan peluang pasar

3. Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)
4. Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan
- b. Program peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan
 1. Pengembangan sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan
 2. Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
 3. Pembinaan, pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH
 4. Pembinaan, pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH
 5. Bimbingan teknologi perbanyakan dan aplikasi agen hayati
 6. Pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam, dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTBP
 7. Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida
 8. Pengembangan kopi rakyat
 9. Pengembangan Mutu Benih Perkebunan
 10. Pengembangan dan Disversifikasi usaha tani tembakau
 11. Updating data base komoditi unggulan
 12. Pengembangan kopi dan coklat diareal kelapa dalam
 13. Pembibitan Tanaman Perkebunan
 14. Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO
 15. Pengembangan Asosiasi petani perkebunan
 16. Pengawasan per-edaran dan mutu benih
 17. Pemberdayaan pelaku perbenihan tanaman perkebunan
 18. Pengembangan/ peningkatan jalan usaha tani
 19. Peremajaan/ replanting kelapa sawit

20. Peremajaan Tanaman Kelapa
21. Pengembangan tanaman lada untuk peningkatan pendapatan petani karet
22. Fasilitasi kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha perkebunan
23. Intensifikasi karet rakyat
24. Pemeliharaan kebun entres
25. Pembangunan kebun induk pinang
26. Sosialisasi penerapan teknologi perkebunan
27. Penyusunan Program Perkebunan
28. Penyusunan Statistik Perkebunan
29. Pertemuan Koordinasi kebakaran lahan dan kebun

3) Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rekapitulasi alokasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan pada APBD Dinas Perkebunan TA. 2018, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2.
Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik
Urusan Wajib dan Pilihan pada APBD Dinas Perkebunan Tahun 2018

No	Bidang/Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	% Fisik
1.	Total Urusan Wajib	2.505.032.360	2.324.091.016	92,78	97,36
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.374.018.600	1.310.063.952	95,35	99,71
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.130.000	23.130.000	100	100
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	333.000.000	277.070.872	83,20	100
3	Penyediaan Administrasi Keuangan	312.033.600	308.102.800	98,74	98,74
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.900.000	61.900.000	100	100

5	Penyediaan Alat tulis kantor	95.555.000	93.931.000	98,30	100
6	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.580.000	34.580.000	100	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	21.120.000	21.120.000	100	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	43.000.000	43.000.000	100	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	447.700.000	447.229.280	99,45	100
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.445.244.000	1.330.968.304	92,09	97,34
1	Pembangunan gedung kantor	699.800.000	627.426.000	89,66	100
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	167.000.000	136.700.000	81,86	82,04
3	Pengadaan mebeleur	76.324.000	75.350.000	98,72	100
4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	373.600.000	365.097.304	97,72	97,72
5	Pengadaan komputer	68.820.000	66.695.000	96,91	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	59.700.000	59.700.000	100	100
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94.200.000	93.258.000	99,00	100
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	94.200.000	93.258.000	99,00	100
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	51.450.000	49.611.000	96,43	100
1	Pendidikan dan pelatihan formal	51.450.000	49.611.000	96,43	100
1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	129.299.760	129.299.760	100	100
1	Penyusunan laporan keuangan dan aset	129.299.760	129.299.760	100	100
2.	Total Urusan Pilihan	19.094.051.337	13.991.697.433	73,28	75,03
2.1.	Program Peningkatan produksi dan teknologi budidaya Perkebunan	15.450.680.337	10.504.944.174	67,99	72,67
1	Pengembangan Kopi Rakyat	1.761.827.000	163.322.673	9,27	9,27

2	Pembibitan Tanaman Perkebunan	2.803.468.000	2.590.079.617	92,39	98,24
3	Pengembangan/peremajaan/ replanting kelapa sawit	1.274.665.000	45.832.032	3,60	3,60
4	Intensifikasi karet rakyat	1.085.981.000	121.462.720	11,18	11,18
5	Pemeliharaan kebun entres	210.674.700	201.212.562	95,51	96,16
6	Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan perkebunan	84.710.00	80.637.500	95,19	95,19
7	Pemberdayaan pelaku perbenihan tanaman perkebunan	109.425.000	109.425.000	99,98	100
9	Pengembangan dan Diversifikasi usaha tani tembakau	999.203.000	907.050.500	90,78	90,79
10	Updating data base pemetaan komoditi unggulan perkebunan	409.087.000	250.587.000	61,26	61,26
11	Pengembangan kopi coklat diareal kelapa dalam	932.171.000	777.444.000	83,40	87,35
12	Pembinaan perusahaan perkebunan besar dan ISPO	334.350.000	334.350.000	100	100
13	Pengembangan Asosiasi petani perkebunan	68.984.000	68.768.000	99,69	100
14	Peremajaan tanaman kelapa	218.900.000	209.064.200	95,51	98,67
15	Pengembangan tanaman lada untuk peningkatan pendapatan petani karet	256.268.000	254.678.000	99,38	100
16	Fasilitasi kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha komoditi perkebunan	423.357.000	386.085.000	91,20	91,20
17	Pengembangan Sarana Irigasi/ TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan	742.218.000	466.113.801	62,80	47,55
18	Fasilitasi Penyelesaian gangguan usaha perkebunan (GUP)	136.238.000	132.642.950	97,36	97,36
19	Pembinaan Pencegahan dan pengurangan kebakaran dan bencana alam, Dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTB	198.563.000	185.834.451	93,59	93,67
20	Pengembangan/ Peningkatan jalan usaha	378.559.637	307.647.700	81,27	81,78

	tani				
21	Peningkatan Pembinaan Pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida	82.000.000	79.194.000	96,58	96,58
22	Pertemuan koordinasi lahan dan kebun	179.969.000	161.303.300	89,63	89,66
23	Pengawasan Peredaran dan Mutu Benih Perkebunan	247.000.000	241.650.000	97,83	97,97
24	Pengembangan Mutu Benih Perkebunan	320.507.000	296.464.279	92,50	92,50
25	Pembinaan, pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH	705.988.000	671.617.889	95,13	96,23
26	Bimbingan Teknologi perbanyakan dan Aplikasi hayati bagi petani provinsi	308.257.000	284.257.000	92,21	92,21
27	Penyusunan Program Perkebunan	339.176.000	339.176.000	100	100
28	Penyusunan Statistik Perkebunan	249.934.000	249.934.000	100	100
2.2	Program Peningkatan Nilai tambah, daya saing dan Pemasaran Produk perkebunan	3.643.371.000	3.486.753.259	95,70	96,05
1	Pengawasan tata niaga TBS dan Bokar	398.445.000	363.291.375	91,18	91,22
2	Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar	361.229.000	358.430.975	99,23	99,45
3	Peningkatan Pengolahan dan mutu hasil perkebunan (Model UPPB)	285.732.000	251.520.580	88,03	88,21
4	Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	2.597.965.000	2.513.510.329	96,75	97,18

Secara terperinci alokasi dan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan urusan wajib dan pilihan pada APBD Dinas Perkebunan TA. 2018, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Urusan Wajib

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang ada pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 9 kegiatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp. 1.374.018.600,- dan realisasi anggaran Rp. 1.310.063.952 (95,35 %). **Output** kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (Jasa surat menyurat, jasa listrik, air & komunikasi, jasa keuangan, ATK, makan minum, instalasi listrik, bahan bacaan dan rapat-rapat koordinasi). **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi dan manajemen perkantoran Dinas Perkebunan Jawa Barat untuk tahun 2018. **Permasalahan** yang terjadi, sejauh ini tidak atau belum ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. **Solusi** yang diambil adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat dan diupayakan melaksanakan peningkatan kualitas mutu pelayanan serta untukantisipasi ke depannya ada hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

2) Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdapat 6 Kegiatan pada program sarana dan prasarana aparatur di Dinas Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp. 1.445.244.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.330.968.304,- (92,09 %). **Output** kegiatan adalah penyediaan sarana prasarana aparatur dan kantor yang memadai (pembangunan gedung kantor, penyediaan peralatan gedung, penyediaan mebeleur, operasional kendaraan dinas, pemeliharaan rutin, dan pengadaan komputer). **Outcome** kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana bagi aparat dan kantor yang memadai untuk penyelenggaraan pembangunan perkebunan provinsi Jambi untuk tahun 2018. **Permasalahan** yang terjadi, sejauh ini tidak atau belum ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. **Solusi** yang diambil adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat dan diupayakan suasana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas bagi aparatur, untukantisipasi ke depannya ada hal yang menghambat pelaksanaan.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp. 94.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 93.258.000,- (99,00%). **Output** kegiatan adalah penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi seluruh pegawai sebanyak 157 steel. **Outcome** meningkatnya disiplin aparatur dinas perkebunan provinsi Jambi. **Permasalahan** yang terjadi, sejauh ini tidak atau belum ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. **Solusi** yang diambil adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat dan diupayakan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan untukantisipasi ke depannya ada hal yang menghambat pelaksanaan.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur di Dinas Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp. 51.450.000,- dan realisasi anggaran Rp. 49.611.000 (96,43 %). **Output** kegiatan adalah pelatihan dan kursus bagi aparatur **Outcome** kegiatan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. **Permasalahan** yang terjadi, sejauh ini tidak atau belum ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. **Solusi** yang diambil adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat dan diupayakan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan untukantisipasi ke depannya ada hal yang menghambat pelaksanaan.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan di Dinas Perkebunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan anggaran Rp. 129.299.760,- dan realisasi anggaran Rp. 129.299.760 (100%). **Output** kegiatan adalah pemutakhiran laporan keuangan dan Asset Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. **Outcome** kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan keuangan dan asset pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. **Permasalahan** yang terjadi, sejauh ini tidak atau belum ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan. **Solusi** yang diambil adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat dan diupayakan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan untukantisipasi ke depannya ada hal yang menghambat pelaksanaan.

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan urusan wajib ini, adalah:

- Kendala yang bersifat koordinatif antar pihak terkait, baik dengan instansi pusat maupun kabupaten kota, khususnya dalam hal sinkronisasi rencana program/kegiatan berdasarkan kewenangan masing-masing pihak terkait.
- Kendala administratif, seperti perubahan pengelola kegiatan, kendala waktu pelaksanaan, keterbatasan sarana serta ketersediaan SDM pendukung yang memadai.
- Keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan beberapa kendala kekurangan jumlah dan kualitas sarana-prasarana yang masih ada
- Keterlambatan penyampaian laporan dari sub unit kerja, yang menyebabkan sering terlambatnya penyampaian laporan ke beberapa instansi terkait.

- Sering terlambatnya penyampaian bahan data/statistik dari kab/kota sebagai bahan penyusunan angka sementara maupun angka tetap data statistik.
- Sering bergantinya petugas data/statistik dan pengelola kegiatan pada OPD Kab/Kota sehingga mengganggu kontinuitas penyampaian laporan data/statistik dari kab/kota yang bersangkutan.

b. Solusi

Solusi atas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan urusan wajib ini, adalah:

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak;
- Peningkatan kualitas ketertiban administrasi kegiatan;
- Peningkatan akselerasi kegiatan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki;
- Memaksimalkan sarana prasarana yang ada;
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait;
- Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan para petugas data/statistik kab/kota, melakukan jemput bola, serta melanjutkan insentif bagi petugas kab/kota terkait pada tahun anggaran mendatang.

2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1). Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan berdasarkan Urusan Pilihan pada APBD TA 2018, terdiri dari 2 Program dan 32 Kegiatan, sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Teknologi Budidaya Perkebunan, terdiri dari 28 kegiatan:

- 1) Pengembangan sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan
- 2) Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
- 3) Pembinaan, pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH
- 4) Bimbingan teknologi perbanyakan dan aplikasi agen hayati
- 5) Pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam, dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTB
- 6) Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida
- 7) Pengembangan kopi rakyat
- 8) Pengembangan Mutu Benih Perkebunan
- 9) Pengembangan dan Disversifikasi usaha tani tembakau
- 10) Updating data base komoditi unggulan
- 11) Pengembangan kopi dan coklat diareal kelapa dalam
- 12) Pembibitan Tanaman Perkebunan
- 13) Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO
- 14) Pengembangan Asosiasi petani perkebunan
- 15) Pengawasan per-edaran dan mutu benih
- 16) Pemberdayaan pelaku perbenihan tanaman perkebunan
- 17) Pengembangan/ peningkatan jalan usaha tani
- 18) Peremajaan/ replanting kelapa sawit

- 19) Peremajaan Tanaman Kelapa
- 20) Pengembangan tanaman lada untuk peningkatan pendapatan petani karet
- 21) Fasilitasi kerjasama antar lembaga petani dan pelaku usaha perkebunan
- 22) Intensifikasi karet rakyat
- 23) Pemeliharaan kebun entres
- 24) Pembangunan kebun induk pinang
- 25) Sosialisasi penerapan teknologi perkebunan
- 26) Penyusunan Program Perkebunan
- 27) Penyusunan Statistik Perkebunan
- 28) Pertemuan Koordinasi kebakaran lahan dan kebun

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan; terdiri dari 4 kegiatan :

- 1) Pengawasan Tata Niaga TBS dan Bokar
- 2) Promosi dan pengembangan peluang pasar
- 3) Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)
- 4) Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan

2). Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kegiatan Pengembangan Kopi Rakyat seluas 153 ha dengan anggaran sebesar Rp.1.761.827.000,-, kegiatan intensifikasi karet rakyat dengan luas 350 ha dengan anggaran sebesar Rp.1.085.981.000,- dan kegiatan replanting kelapa sawit seluas 40 ha dengan anggaran sebesar Rp.1.274.665.000,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penggunaan bibit unggul, peningkatan produktivitas tanaman karet rakyat dan peremajaan kelapa sawit yang telah tua. Ketiga kegiatan ini gagal tender, hal ini dikarenakan anggaran perubahan keluar pada bulan nopember, dengan rentang waktu yang singkat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga ketiga kegiatan ini tidak dapat direalisasikan.

- Kegiatan pengembangan sarana irigasi/TAM dan optimasi lahan perkebunan di lahan gambut 97 unit dengan anggaran sebesar Rp. 742.218.000,- terealisasi sebesar Rp. 466.113.801,- (62,80%). Ada beberapa out put kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kajian rencana aksi pengelolaan lahan gambut, pengadaan alat pemantau tinggi air dan perjalanan dinas dalam daerah. Hal dikarenakan; kegiatan kajian disinyalir tumpang tindih dengan tupoksi Balitbagda, perkiraan harga yang tidak sesuai untuk pembelian alat pemantau tinggi air yang terlalu tinggi, dan wilayah kegiatan hanya terdapat di 2 kabupaten (Tanjung Barat dan Tanjung Timur).
- Penetapan calon petani dan calon lokasi pemberian hibah kepada petani ada yang mengalami perubahan sehingga memerlukan waktu untuk merevisi SK penerima;
- Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman hanya 2 orang masih kurang dari kebutuhan, khususnya dalam hal operasional pemeriksaan di lapangan, minimal 10 orang; Sarana laboratorium pengujian mutu benih masih kurang memadai dan tenaga penguji laboratorium masih kurang;
- Sebagian besar kelembagaan petani belum tertata dengan baik dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai kelembagaan asosiasi petani ataupun kelembagaan usaha tani (kelompoktani)
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki BP2TP2 dalam rangka pelaksanaan pengendalian OPT, antara lain alat-alat pengendalian OPT untuk mengendalikan OPT pada tanaman produktif dengan ketinggian pohon di atas 5 meter, alat untuk pemangkasan cabang/ranting dan lain-lain sehingga dalam proses pengendalian OPT pada hamparan kebun memerlukan waktu yang cukup lama.

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki BP2TP2 dalam rangka pelaksanaan pengendalian OPT, antara lain alat-alat pengendalian OPT untuk mengendalikan OPT pada tanaman produktif dengan ketinggian pohon di atas 5 meter, alat untuk pemangkasan cabang/ranting dan lain-lain sehingga dalam proses pengendalian OPT pada hamparan kebun memerlukan waktu yang cukup lama.
- Keterbatasan SDM berdampak terhadap terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan karena OPT yang berkembang lebih spesifik lokasi dan endemik lokasi, sehingga diperlukan ketelitian pengamatan awal untuk menentukan jenis, bahan dan dosis pengendalian.
- Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara menyeluruh, hal ini karena penyelesaiannya melibatkan beberapa Instansi terkait lainnya atau tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perkebunan.
- Pada lahan perkebunan rakyat masih banyak dijumpai pengelolaan komoditi perkebunan yang belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

- Pengusahaan komoditi perkebunan di lahan rakyat pada bagian wilayah tertentu di Jawa Barat masih dijumpai penanaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan Agroklimat setempat.
- Kemampuan pelaku usaha perkebunan sangat beragam, hal ini disebabkan belum optimalnya pembinaan, dan penyampaian informasi teknologi PHT sehingga berdampak terhadap lemahnya penerapan PHT dalam mengendalikan OPT pada tanaman perkebunan.
- Penerapan aspek teknologi budidaya secara baik dan benar belum optimal.

c. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak;
- Memantapkan kelompok penerima hibah;
- Peningkatan akselerasi kegiatan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja terkait;
- Mengoptimalkan petugas PBT dan fungsional umum untuk aplikasi dilapangan dan mengusulkan penambahan calon fungsional PBT;
- Melakukan kerjasama dengan Puslit/Balit dalam penyediaan kebun sumber benih untuk kebutuhan para penangkar benih;
- Mengoptimalkan para petugas teknis fungsional PBT dan fungsional umum untuk operasional dilapangan dan mengajukan penambahan baru petugas PBT.
- Memanfaatkan laboratorium yang sudah ada dan mengusulkan sarana bangunan laboratorium sesuai standar teknis dan mengusulkan SDM tenaga laboratorium
- Pembinaan berjenjang dan berkala dari seluruh instansi terkait di tingkat Provinsi maupun kabupaten secara berkesinambungan.

- Penguatan modal kelembagaan petani (asosiasi maupun kelompok) dalam rangka menunjang aktivitas kelembagaan yang dikelolanya
- Penataan kesekretariatan/kepengurusan kelembagaan petani baik secara fisik maupun administrasi
- Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan SDM Perkebunan melalui program pelatihan, magang atau peningkatan wawasan.
- Perlu dilakukan adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan penanganan Gangguan Usaha perkebunan
- Dalam pengembangan komoditi perkebunan maupun perluasan areal serta pengembangan perkebunan berwawasan lingkungan perlu adanya pembinaan teknis secara berkelanjutan dan intensif terhadap para pelaku perkebunan di Jambi
- Mengupayakan pengusulan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan untuk terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan secara maksimal.
- Meningkatkan pengamatan dini agar diperoleh data dan informasi yang lebih akurat untuk penyiapan bahan pengendalian, sarana dan prasarana pengendalian lebih tepat guna dan benar belum optimal.
- Melaksanakan pembinaan dengan pola interaktif disertai demplot, uji coba atau penerapan teknologi supaya pelaku usaha perkebunan lebih mudah memahami, menguasai teknologi PHT dan lebih terinspirasi untuk menerapkan teknologi PHT secara baik dan benar.
- Melakukan rasionalisasi antara tenaga ahli calon narasumber dengan lembaga tempat bernaung narasumber.
- Melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam DPA agar alokasi anggaran yang sudah disediakan dapat dimanfaatkan.
- Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan HGU perlu adanya regulasi untuk memayungi kegiatan masyarakat yang dapat diintegrasikan pada lahan HGU

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cermin dari sistem dan prosedur penugasan: (i) Pemerintah kepada daerah dan atau desa, (ii) dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta (iii) pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah mengacu kepada beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- PMK Nomor 171/PMK.02/2013 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- PMK Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2018, dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berasal dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2018, dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berasal dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Pada Tahun Anggaran 2018, Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah: Satker 12 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05);

5. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Pada Tahun Anggaran 2018, alokasi Dana Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 23.594.334.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 20.436.603.000,- atau sekitar 86,62%, dan realisasi fisik sebesar 91,75%, yang berasal dari Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

Adapun rincian realisasi dari masing-masing Program dan Kegiatan tersebut, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

- a. **Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar** dengan anggaran sebesar Rp. 15.907.580.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.945.754.138,- (96,45%) dan realisasi fisik sebesar 98,45%.
- b. **Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan** dengan anggaran sebesar Rp.2.020.775.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.803.308.700,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. **Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah** dengan anggaran sebesar Rp. 776.736.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 427.601.250,- (55,05%) dan realisasi fisik sebesar 61,45%.
- d. **Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.245.435.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.156.590.811,- (96,04%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- e. **Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.513.208.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 971.819.554,- (64,29%) dan realisasi fisik sebesar 71,00%.
- f. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya,** dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.130.529.300,- (99,99%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Rincian jumlah anggaran dan sumbernya dari dana Tugas Pembantuan yang diterima tahun 2018, adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tugas Pembantuan (APBN) Tahun 2018

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi
		(Rp)	(%)	(Fisik)
1	2	3	4	5
TOTAL	23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75
Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Perkebunan	23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75
Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	23,594,334,000	20,436,603,753	86.62	91.75
1 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	15,907,580,000	13,945,754,138	87.67	98.45
2 Dukungan Perlindungan Perkebunan	2,020,775,000	1,803,308,700	89.24	100.00
3 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1,130,600,000	1,130,529,300	99.99	100.00
4 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	776,736,000	427,601,250	55.05	61.45
5 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2,245,435,000	2,156,590,811	96.04	100.00
6 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1,513,208,000	972,819,554	64.29	71.00

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah diantaranya terdapat komponen bantuan saprodi yang terkena penghematan dari pusat sehingga paket bantuan tidak utuh; terdapat kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun yang terkena penghematan dari pusat, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan; masih terdapat aset peralatan dan mesin yang belum dihapuskan; adanya penghematan anggaran dari pusat sehingga beberapa kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan; data calon petani calon lahan (CP/CL) dari kabupaten sering berubah-ubah sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat. Adapun solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan berbagai pihak terkait, serta alokasi anggaran untuk sub-sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disetor kembali ke KAS Negara dan dianggarkan kembali di tahun 2018 yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten/Kota dan Desa TA 2018, yang merupakan bagian dari sub sektor perkebunan, sejauh ini tidak ada.

BAB VI

PENGHARGAAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Selama kurun waktu tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, telah menerima beberapa penghargaan sebagai berikut:

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima	Dalam Rangka
1.	Dinas Kooperatif dalam menyampaikan data	BPS Provinsi Jambi	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	HUT BPS
2.	Sebagai Pemerintah Daerah yang mendukung perkebunan berkelabjutan	Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI	Gubernur Jambi	ISPO
3.	Pemenang kontes kopi speciality dan ekspor kopi ke Amerika dan Australia	Panitia Lomba	Kelompok Kopi Arabika Kerintji	
4.	PNS Teladan Berprestasi, kategori fungsional tertentu	Gubernur Jambi	Ir. Chatarina Dara Irianti	HUT Jambi ke 62

BAB. VII PENUTUP

Dari capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi seperti yang terurai pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018 ini, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melalui dana APBD 2018 telah terealisasi sebesar (Keuangan 75,54 % dan Fisik 76,74 %). Melalui Program Utama pengembangan perkebunan pada tahun 2018 yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan asset
6. Peningkatan Nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk perkebunan
7. Peningkatan Produksi dan Teknologi budidaya perkebunan

Dalam Program peningkatan produksi dan teknologi budidaya perkebunan terdapat kegiatan pengembangan kopi rakyat, pengembangan/peremajaan/replanting kelapa sawit, intensifikasi karet rakyat ini terdapat non teknis dikarenakan keluarnya anggaran perubahan pada bulan nopember sedangkan pekerjaan cukup memakan waktu sehingga tidak dapat dikerjakan (gagal tender). Begitu pula pekerjaan Pengembangan sarana irigasi/TAM dan optimalisasi lahan perkebunan, terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kajian pemanfaatan lahan gambut yang diperkirakan tumpang tindih dengan Tufoksi Balai Litbang. Untuk kegiatan lain hanya terdapat sisa anggaran yang disebabkan dari sisa penawaran lelang dan sisa penggunaan kegiatan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja SKPD.

